

DOI: <http://dx.doi.org/10.33846/sf12nk315>

Optimalisasi Kinerja Pemerintah Desa dalam Penggunaan Infrastruktur *Water Closet* (WC) Umum untuk Mengurangi Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kecamatan Tanarighu Kabupaten Sumba Barat

Denisius Umbu Pati

Universitas Kristen Wira Wacana Sumba; umbudenis@gmail.com (koresponden)

Pinky Alfa Ray Leo Lede

Universitas Kristen Wira Wacana Sumba; pinky.leo.lede@unkriswina.ac.id

Martina F. Diaz

Program Studi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kupang; martinadavan@gmail.com

ABSTRACT

The performance of the village government is an indicator or benchmark in determining how the government is successful in the welfare of its people to achieve high levels of productivity in society and its government. Public services are part of the performance of the government, how the village government provides or takes policies and decisions in an effort to improve the quality of life and life of a more prosperous community. The village government took a policy to hold a public Water Closet (WC) that the community could use to reduce diseases caused by the environment. The research objective is to see 1). Village Government Performance in Using Public Water Closet (WC) Infrastructure to Reduce Open Defecation (BABS); 2). Community satisfaction with the performance of the Village Government in the Use of Public Water Closet (WC) Infrastructure to Reduce Open Defecation (BABS); 3). obstacles received by the village government in carrying out the development of Public Water Closet (WC) infrastructure to Reduce Open Defecation (BABS). The research method used in this research was descriptive qualitative method. The study population was 36 village fund managers and community leaders. The sample in this study consisted of 18 village fund managers and community leaders spread across 8 villages from 18 villages in Tanarighu District, West Sumba Regency. The sampling technique used in this study was purposive sampling, by using key people who understand village problems clearly, the manager of village funds, namely the village head or village secretary, as well as people who feel the village government policies, namely community leaders. The results showed that the performance of the village government was good where the community was satisfied with the services provided, the village community's satisfaction with the performance of the village government, the community was satisfied because the village government was currently transparent, accountability and the balance of community rights and obligations were the priority of the village government, and obstacles. what the village government receives is classified as difficult with the location or land that is owned by individuals and is supported by a lack of knowledge.

Keywords: village government; public water closet (WC) infrastructure; open defecation (BABS)

ABSTRAK

Kinerja pemerintah desa merupakan indikator atau tolak ukur dalam menentukan bagaimana pemerintah tersebut berhasil dalam mensejahterakan masyarakatnya untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam Masyarakat dan pemerintahannya. Pemerintah desa mengambil kebijakan untuk mengadakan *Water Closet* (WC) umum yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam mengurangi penyakit yang disebabkan oleh lingkungan. Tujuan penelitian untuk melihat 1). Kinerja Pemerintah Desa dalam Penggunaan Infrastruktur *Water Closet* (WC) Umum untuk Mengurangi Buang Air Besar Sembarangan (BABS); 2). Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam Penggunaan Infrastruktur *Water Closet* (WC) Umum untuk Mengurangi Buang Air Besar Sembarangan (BABS); 3). hambatan yang diterima pemerintah desa dalam menjalankan pemangunan infrastruktur *Water Closet* (WC) Umum untuk Mengurangi Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Populasi penelitian adalah 36 orang pengelola dana desa dan tokoh masyarakat. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 18 orang pengelola dana desa dan tokoh masyarakat yang tersebar di 8 desa dari 18 desa di Kecamatan Tanarighu Kabupaten Sumba Barat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan menggunakan *key people* yang memahami masalah desa secara jelas, pengelola dana desa yaitu kepala Desa atau Sekretaris Desa, serta masyarakat yang merasakan kebijakan pemerintah desa yaitu tokoh masyarakat dan yang menjadi sampel masuk dalam kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian didapatkan kinerja pemerintah desa sudah baik dimana masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang telah diberikan, kepuasan masyarakat desa terhadap kinerja pemerintah desa, masyarakat merasa puas karena pemerintah desa saat ini transparan, akuntabilitas dan keseimbangan hak dan kewajiban masyarakat menjadi prioritas pemerintah desa, dan hambatan yang diterima pemerintah desa tergolong sulit dengan lokasi atau lahan yang merupakan milik perorangan dan didukung dengan pengetahuan yang kurang.

Kata kunci: pemerintah desa; infrastruktur *water closet* (WC) umum; buang air besar sembarangan (BABS)

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu tanggung jawab dari instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, maupun di desa. Pelaksanaan pelayanan publik ini merupakan salah satu fungsi pemerintah dalam melakukan kemudahan pada masyarakat dalam menggunakan hak dan kewajibannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁽¹⁾

Undang-Undang 32 Tahun 2004 membahas tentang apa saja perangkat pemerintah yang ada di desa, sehingga dirancang lagi sebuah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Prinsip peraturan ini memuat beberapa hal antara lain yang mengatur tentang kewenangan desa, kelembagaan pemerintah desa, aparatur

desa, perencanaan desa, dan keuangan desa. Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* organisasi.⁽²⁾

Pembangunan kesehatan hakekatnya merupakan upaya yang dilaksanakan semua komponen bangsa bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan. Tantangan dihadapi dunia terkait pembangunan kesehatan, khususnya bidang *higiene* dan sanitasi masih sangat besar. Berdasarkan data Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kementerian Kesehatan 2018 akses sanitasi di Indonesia sudah mencapai 75% dengan desa *Open Defecation Free* (ODF) sebanyak 17.519 desa. *Open defecation free* adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Sebanyak 290,86 juta jiwa penduduk Indonesia masih ada 51,44 juta jiwa yang melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS).⁽³⁾

Pembangunan Desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional memiliki arti yang sangat strategis jika dikembangkan secara baik. Dalam kenyataannya banyak desa-desa di Indonesia belum berkembang secara mandiri dari desa swadaya, swakarya dan swasembada disebabkan karena belum tergalinya potensi desa secara baik, sehingga kurang memberikan kontribusi terhadap hasil-hasil pertanian.⁽⁴⁾

Provinsi NTT tahun 2018 memperlihatkan hasil bahwa jumlah desa yang melaksanakan STBM 2.554 (76,2%) , Desa Stop BABS sebanyak 1.340 Desa (40%) dan Desa STBM sejumlah 757 (22%). Kabupaten Sumba Barat desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat dari 74 desa/kelurahan sudah melakukan sanitasi total berbasis masyarakat, desa stop BABS (SBS) berjumlah 49 (66,2%). Jamban sehat semi permanen berjumlah 9.978, jumlah jamban sehat permanen berjumlah 4.320 dan jumlah jamban keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) berjumlah 15.938 (13,8%).⁽⁵⁾

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) mengetahui Kinerja Pemerintah Desa dalam Penggunaan Infrastruktur *Water Closet* (WC) Umum untuk Mengurangi Buang Air Besar Sembarang (BABS) di Kecamatan Tanarighu Kabupaten Sumba Barat; 2) mengetahui Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam Penggunaan Infrastruktur *Water Closet* (WC) Umum untuk Mengurangi Buang Air Besar Sembarang (BABS) di Kecamatan Tanarighu Kabupaten Sumba Barat; 3) mengetahui hambatan yang diterima pemerintah desa dalam menjalankan pemangunan infrastruktur *Water Closet* (WC) Umum untuk Mengurangi Buang Air Besar Sembarang (BABS) di Kecamatan Tanarighu Kabupaten Sumba Barat.

METODE

Penelitian ini berupa penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif,⁽⁶⁾ dengan melakukan penggalian data terkait kinerja pemerintah desa, kepuasan masyarakat dan hambatan pemerintah desa melalui wawancara dengan informan dari Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat di Kecamatan Tanarighu Kabupaten Sumba Barat. Jenis data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini ialah data primer yaitu data yang bersumber langsung dari para responden/informan yang ditetapkan sesuai kriteria. Selain itu juga dikumpulkan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap data primer.

Populasi penelitian adalah 36 orang pengelola dana desa dan tokoh masyarakat, sampel dalam penelitian ini berjumlah 18 orang pengelola dana desa dan tokoh masyarakat yang tersebar di 8 desa dari 18 desa di Kecamatan Tanarighu Kabupaten Sumba Barat, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan menggunakan *key people* yang memahami masalah desa secara jelas, pengelola dana desa yaitu kepala Desa atau Sekretaris Desa, serta masyarakat yang merasakan kebijakan pemerintah desa yaitu tokoh masyarakat.⁽⁷⁾ sampel dalam penelitian ini harus melalui kriteria yaitu responden bersedia untuk menjadi sampel penelitian, desa penelitian harus terdapat infrastruktur *water closet* (WC) umum. Dalam pemilihan responden berdasarkan yakni responden yang mempunyai informasi berkualitas terhadap judul penelitian dan bersedia memberikan informasi atau data yang akurat kepada peneliti. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan untuk dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan atau menganalisis variabel. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa data yang diperoleh secara langsung dilapangan dari kepala Desa atau Sekretaris Desa, serta masyarakat yang merasakan kebijakan pemerintah desa yaitu tokoh masyarakat, untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat peneliti melakukan wawancara dan observasi secara langsung, dan data sekunder berupa data yang mendukung informasi dari responden yang diambil melalui dokumentasi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dimana peneliti melihat secara langsung infrastruktur wc umum dan wc pribadi yang merupakan bantuan dari pemerintah desa, wawancara dimana peneliti melakukan wawancara secara terstruktur dimana peneliti melakukan wawancara sesuai dengan pertanyaan yang sudah disiapkan dan wawancara tidak terstruktur dimana peneliti melakukan wawancara yang apabila pada saat wawancara terstruktur ada hal-hal yang perlu ditanyakan secara mendalam dengan responden peneliti, dokumentasi dimana peneliti mendokumentasikan data-data terkait variabel penelitian, berupa catatan, notulen dan lain-lain. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Reduksi data dimana peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan serta penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data kasar dari catatan atau kuesioner selama di lapangan. Reduksi data peneliti membuat ringkasan kontak, mengembangkan kategori, pengkodean dan membuat catatan untuk lebih merincikan sekaligus menajamkan, penggolongan, mengarahkan jawaban-jawaban responden sesuai dengan variabel penelitian. Kemudian menarik kesimpulan yang tepat. Penyajian data dimana sekumpulan informasi tersusun dan memberikan penarikan kesimpulan. Menarik Kesimpulan /Verifikasi data Upaya yang diperoleh selama pengumpulan data berlangsung. Penulis melakukan kesimpulan sejak awal pengumpulan data.

HASIL

Kecamatan Tanarighu merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kecamatan Tanarighu mempunyai ibu kota yang berada di Desa Malata. Luas Kecamatan Tanarighu sebesar 139,79 Km². Batas-batas wilayah Kecamatan Tanarighu sebagai berikut: 1) Utara berbatasan dengan Selat Sumba, 2) Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumba Tengah, 3) Selatan berbatasan dengan Kecamatan Loli, 4) Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Wilayah administrasi Kecamatan Tanarighu Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Distribusi wilayah administrasi Kecamatan Tanarighu

No	Wilayah	Jumlah
1	Desa	18
2	Dusun atau lingkungan	66
3	Rukun warga (RW)	132
4	Rukun tetangga (RT)	264
5	Kepadatan penduduk	145,03 jiwa/Km ²
6	Luas daerah	139,79 Km ²

Wilayah administrasi kecamatan Tanarighu terdiri dari 18 desa dengan 66 dusun atau lingkungan, 132 rukun warga (RW), 264 rukun tetangga (RT) dengan luas daerah 139,79 Km² dan kepadatan penduduk 145,03 jiwa/ Km². Lokasi penelitian adalah Kecamatan Tanarighu yang melibatkan 18 desa yakni; Desa Lokory, Desa Lolo Wano, Desa Ngadu Pada, Desa Malata, Desa Lingu Lango, Desa Manu Kuku, Desa Wee Patola, Desa Kareka Nduku, Desa Wanokaza, Desa Bondo Tera, Desa Zala Kadu, Desa Lolo Tana, Desa Kareka Nduku Selatan, Desa Kareka Nduku Utara, Desa Manu Mada, Desa Elu Loda, dan Desa Tarona.

Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan, jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Tujuan dari pemberian Alokasi Dana Desa ini adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, dan mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat di desa.⁽⁸⁾

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.⁽²⁾ Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Tanarighu, hasil wawancara dan observasi 8 desa di Kecamatan Tanarighu Produktivitas pemerintah desa di Kecamatan Tanarighu dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sudah baik hal ini dilihat dari hasil wawancara dan observasi kepada responden (tokoh masyarakat) yang menyatakan bahwa kinerja dari pada pemerintah desa sudah baik. Pemerintah desa di kecamatan Tanarighu fokus dalam pembangunan desa, baik infrastruktur seperti jalan, jembatan maupun rumah, jamban atau WC, air dan listrik, pembangunan desa menjadi prioritas bagi pemerintah desa di Kecamatan Tanarighu. Masyarakat yang menerima bantuan atau masyarakat merasakan kinerja pemerintah desa mengakui kinerja dari pemerintah desa di Kecamatan Tanarighu baik dan merata. Pembangunan jamban atau *Water Closet* adalah upaya pemerintah desa dalam menekan angka kejadian penyakit yang disebabkan sanitasi lingkungan yang buruk seperti kejadian diare. Pembangunan jamban atau *Water Closet* baik umum maupun individu merupakan langkah pemerintah desa dalam mendukung sanitasi total berbasis masyarakat dalam mengurangi angka buang air besar disembarang tempat.

Pembangunan WC umum merupakan program dari pemerintah kabupaten yang diberikan di desa yang dianggap belum memadai fasilitas jamban. Program pemerintah kabupaten tersebut diberikan untuk desa biasanya program tersebut diberikan kepada desa secara penuh atau wc atau jamban sampai rampung. Sedangkan jamban atau wc pribadi yang dimasukkan dalam program pembangunan desa yang di swakelola oleh masyarakat desa dan dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat desa, pembangunan jamban atau *Water Closet* pribadi merupakan bantuan untuk pribadi masyarakat, bantuan tersebut biasanya bahan atau material seperti beton, semen dan kayu ataupun yang lainnya tergantung dengan kesepakatan antara pemerintah desa dan masyarakat yang menerima bantuan tersebut.

Dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah desa di Kecamatan Tanarighu selalu mengikutsertakan masyarakat desa dalam proses pengambilan kebijakan misalnya dalam penyusunan APBDes, Pembuatan Peraturan Desa atau kegiatan yang lainnya.⁽⁷⁾ Praktek buang air besar ialah perilaku seseorang yang berkaitan dengan kegiatan pembuangan tinja meliputi, tempat pembuangan tinja dan pengolahan tinja yang memenuhi syarat kesehatan dan bagaimana cara buang air besar yang sehat sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan.⁽⁹⁾

PEMBAHASAN

Pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. Pelayanan publik adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik (publik/umum). Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan suatu badan usaha karena masyarakat adalah konsumen dari produk yang dihasilkannya. Buruknya kinerja pelayanan publik ini antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.⁽¹⁰⁾

Pelayanan publik terdapat beberapa hal yang perlu dilihat adalah:⁽¹¹⁾

- Transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
- Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kepuasan masyarakat desa di Kecamatan Tanarighu terhadap kinerja pemerintah desa berdasarkan hasil wawancara dan observasi, masyarakat merasa sangat puas dengan kinerja masyarakat pemerintah desa, saat ini jamban atau *Water Closet* umum maupun pribadi menjadi prioritas bagi pemerintah desa hal ini merupakan upaya pemerintah desa dalam menekan angka SAS atau BABS dan penyakit yang diakibatkan lingkungan buruk, selain itu juga kinerja pemerintah desa dimana pemerintah desa memperhatikan kebutuhan masyarakat rumah layak huni, air bersih, listrik, jalan maupun fasilitas seperti sekolah, pasar dan rumah ibadah. Namun ada juga masukan kepada pemerintah desa agar dalam memberikan bantuan harus seimbang sehingga masyarakat secara keseluruhan mendapatkan bagian dari program bantuan pemerintah desa dalam membangun desa. Dalam proses pembangunan jamban atau *Water Closet* umum beberapa desa diantaranya membangun infrastruktur jamban atau *Water Closet* umum di lokasi perorangan sehingga jamban atau *Water Closet* umum tidak digunakan oleh masyarakat umum, sehingga berdasarkan pengamatan dan observasi terdapat jamban atau *Water Closet* umum yang sudah rusak karena tidak terpakai. Akibat dari pada itu beberapa responden yang diwawancarai merasa bahwa jamban atau *Water Closet* umum yang dibangun bukan untuk umum tetapi untuk pribadi atau perorangan yang dibangun pada lokasinya. Selain itu juga kepuasan masyarakat lainnya berdasarkan hasil wawancara ialah dimana pada saat pembangunan jamban atau *Water Closet* umum selalu melibatkan masyarakat dalam membangun infrastruktur tersebut. Hasil wawancara dengan responden, masyarakat dilibatkan dalam mengawasi pengelolaan dana desa, olehkarena itu diharapkan masyarakat juga mengambil bagian dalam proses pengawasan dana desa, desa juga dituntut untuk transparan terhadap anggaran dana desa yaitu melalui pemasangan poster anggaran desa dan sejumlah program pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara hambatan yang diterima oleh pemerintah desa ialah lahan yang digunakan untuk lokasi pembangunan jamban atau *Water Closet* umum tergolong sulit dikarenakan lokasi atau lahan milik perorangan atau perkampungan (suku), sebagian desa secara geografis letaknya di daerah perbukitan dan tidak rata, sehingga proses pembangunan jamban atau *Water Closet* harus melalui pendekatan kekeluargaan dan diberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat, itupun masyarakat memberikan lahan atau lokasinya untuk pembangunan jamban atau *Water Closet* umum di lokasi yang dekat dengan rumah perorangan sehingga banyak masyarakat yang menganggap bahwa jamban atau *Water Closet* umum tersebut untuk milik perorangan, pengetahuan masyarakat juga terkait pentingnya jamban atau *Water Closet* umum akan meningkatkan upaya kesehatan perorangan maupun sanitasi yang baik dalam mendukung sanitasi total berbasis masyarakat dimana desa dituntut untuk melakukan desa STBM. Melaksanakan pembangunan di daerah perdesaan menghadapi hambatan dan kendala yang tidak ringan dilihat dari aspek geografis, tipologis, demografis, ketersediaan sarana prasarana, kelemahan dalam akses modal dan informasi pasar, kemampuan sumberdaya manusia (SDM) yang lemah, partisipasi masyarakat masih belum secara proaktif, kemampuan kelembagaan perdesaan masih lemah dan masih banyak kelemahan operasional dan fungsional lainnya.⁽¹²⁾

KESIMPULAN

Diketahui bahwa hasil penelitian optimalisasi kinerja pemerintah desa dalam penggunaan infrastruktur *water closet* (WC) umum untuk mengurangi buang air besar sembarangan (BABS) di Kecamatan Tanarighu Kabupaten Sumba Barat, kinerja pemerintah desa sudah baik dimana masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang telah diberikan, kepuasan masyarakat desa terhadap kinerja pemerintah desa, masyarakat merasa puas karena pemerintah desa saat ini transparan, akuntabilitas dan keseimbangan hak dan kewajiban masyarakat menjadi prioritas pemerintah desa, dan hambatan yang diterima pemerintah desa tergolong sulit dengan lokasi atau lahan yang merupakan milik perorangan dan didukung dengan pengetahuan yang kurang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Wuri RR, Kaunang M, Pioh NR. Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi di Desa Singsong Kecamatan Passi Timur).
2. Rosalina M. Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. 1:15.
3. Dafitri A, Raharjo BB. Implementasi Rencana Aksi Daerah Percepatan Kabupaten Demak Bebas Buang Air Besar Sembarangan. 2020;10.
4. Undap GJE, Sondakh ER, Rorong A. Hubungan Motivasi, Produktivitas dan Budaya Kerja Aparat Pemerintah Desa dengan Efektifitas Keberhasilan Pembangunan Desa. 2019;4:12.
5. Minggu DD. Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018. 2018;274.
6. Boedijono B, Wicaksono G, Puspita Y, Bidhari SC, Kusumaningrum ND, Asmandani V. Efektifitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. J Ris Manaj Dan Bisnis JRMB Fak Ekon UNIAT. 2019 Feb 23;4(1):9–20.
7. Setyowati E. Tata Kelola Pemerintahan Desa pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM): Studi Tiga Desa di Kabupaten Malang. 2019;9(2):19.
8. Mahamurah D, Kaunang M, Sambiran S. Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi di Desa Nahepese Kecamatan Manganitu). :12.
9. Saliani H, Pinontoan OR, Posangi J. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Praktek Buang Air Besar Masyarakat di Desa Garuga Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. :20.
10. Mote F. Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik di Puskesmas Ngesrep Semarang. :147.
11. Siti Hamidah MI. Indeks Kepuasan Publik Terhadap Kegagalan Mutu Kinerja Pelayanan BPM PTSP (Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Batam. J Cahaya Keadilan. 2019 Mar 29;6(2):161.
12. Masitah I. Pengembangan Desa Wisata oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. 2019;6:12.